



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 telah diatur dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan kondisi keuangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Teknis Perhitungan dan Rumusan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
28. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV Pasal 10 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

Penetapan rincian alokasi dana desa (ADD) Perubahan untuk setiap Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan BAB VI, Pasal 12 dan Pasal 13 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PERMINTAAN, PERSYARATAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permintaan pembayaran Alokasi Dana Desa yang direkomendasikan Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sesuai dengan nilai besaran anggaran Alokasi Dana Desa;
- (2) Kepala DPMD selanjutnya melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas persyaratan ;
- (3) Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala DPMD mengajukan rekomendasi pembayaran kepada BPKD;
- (4) Kepala BPKD selanjutnya melakukan evaluasi berkas persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa;
- (5) Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala BPKD melaksanakan pembayaran Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

Pasal 13

- (1) Permohonan permintaan pembayaran Alokasi Dana Desa untuk Tahap Pertama harus dilengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut :
 - a. peraturan desa tentang APB Desa Tahun 2017;
 - b. laporan realisasi APB Desa Tahap II (kedua)/akhir tahun anggaran 2016 kepada Bupati melalui DPMD
- (2) Persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa untuk tahap II harus dilengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi APB Desa Tahap pertama minimal 80% (delapan puluh persen);
 - b. laporan realisasi Tahap I (pertama) penyerapan APB Desa minimal 75% (tujuh puluh lima persen)
3. Ketentuan BAB VIII, Pasal 20 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

PENYAMPAIAN LAPORAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA

Pasal 20

- (1) Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa
- (2) Jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana minimal 80% (sembilan puluh persen) Tahap I
 - b. laporan realisasi Tahap II (kedua)/akhir tahun
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana Tahap I minimal 80% (sembilan puluh persen) adalah laporan yang digunakan sebagai bahan pencairan Alokasi Dana Desa tahap berikutnya
- (4) Laporan Realisasi Akhir Tahun adalah Laporan berkala Kepala Desa dalam penggunaan anggaran satu tahun anggaran yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan Evaluasi dan paling lambat dimasukkan pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 3 Agustus 2017

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


SYAMSUDDIN A. HAMID



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


EFFENDI KASMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 40

DATA DASAR PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

KODE KEC.	URUTAN KECAMATAN	KODE DESA	URUT DESA	JP	JPM	LW	IKG
12	LIUKANG TANGAYA	2	SABARU	1059	200	9.974608	58.294267
12	LIUKANG TANGAYA	3	BALO BALOANG	2797	659	12.539507	60.269348
12	LIUKANG TANGAYA	4	SABALANA	3612	839	19.379238	56.887255
12	LIUKANG TANGAYA	5	TAMPAANG	1213	555	11.019567	58.703444
12	LIUKANG TANGAYA	6	SAILUS	2911	484	13.650963	55.884988
12	LIUKANG TANGAYA	7	SATANGER	975	165	16.624347	56.441186
12	LIUKANG TANGAYA	8	KAPOPOSAN BALI	908	64	9.879612	79.87694
12	LIUKANG TANGAYA	9	POLEONRO	793	175	7.438208	77.659648
22	LIUKANG KALMAS	2	PAMMAS	3135	591	11.019567	49.900623
22	LIUKANG KALMAS	3	SABARU	1491	215	10.829574	70.598163
22	LIUKANG KALMAS	4	KANYURANG	2298	415	10.354593	55.506483
22	LIUKANG KALMAS	5	DOANG DOANGAN LOMPO	763	46	10.354593	54.574092
22	LIUKANG KALMAS	6	MARA SENDE	981	63	11.779537	51.439143
22	LIUKANG KALMAS	7	DEWAKANG	1811	255	10.354593	56.65622
32	LIUKANG TUPABBIRING	2	MATTIRO DECENG	3089	1953	8.549664	50.796678
32	LIUKANG TUPABBIRING	3	MATTIRO LANGI	2769	1931	10.449589	53.229298
32	LIUKANG TUPABBIRING	9	MATTIRO MATAE	1766	810	37.998506	62.982823
32	LIUKANG TUPABBIRING	10	MATTIRO UJUNG	1417	978	14.24944	54.028422
32	LIUKANG TUPABBIRING	11	MATTIRO DOLANGENG	1831	1007	5.699776	68.205868
32	LIUKANG TUPABBIRING	13	MATTIRO BONE	1086	563	2.697894	51.700976
32	LIUKANG TUPABBIRING	15	MATTARO ADAE	1177	633	3.951845	57.788578
52	BALOCCI	5	TOMPOBULU	1796	611	54.641852	39.119997
62	BUNGORO	4	BOWONG CINDEA	3471	1504	5.015803	28.400191
62	BUNGORO	5	TABO TABO	3093	1031	30.626796	29.059981
62	BUNGORO	6	MANGILU	4324	1196	17.232323	30.05119
62	BUNGORO	7	BULU CINDEA	4285	1454	6.649739	31.747617
62	BUNGORO	8	BIRING ERE	3785	698	2.944884	29.663118
72	LABAKKANG	5	PATTALASSANG	2471	800	6.991725	39.362655
72	LABAKKANG	6	MANAKKU	2383	933	8.625661	35.503048
72	LABAKKANG	7	GENTUNG	2446	822	7.219716	32.558583
72	LABAKKANG	8	BATARA	4166	2070	6.307752	40.029281
72	LABAKKANG	9	TARAWEANG	4672	1782	9.41413	29.945196
72	LABAKKANG	10	KANAUNGAN	4102	1228	10.801075	30.056281
72	LABAKKANG	11	BONTO MANAI	2754	1061	6.573742	46.381596
72	LABAKKANG	12	KASSI LOE	2101	1013	6.535743	35.636939
72	LABAKKANG	13	BARA BATU	4462	1690	10.307095	44.71984
82	MARANG	5	PADANG LAMPE	3131	1080	10.145601	28.552989
82	MARANG	6	TAMANGAPA	3217	1270	6.991725	28.426383
82	MARANG	7	PITUSUNGGU	1825	709	3.467364	33.606797
82	MARANG	8	PITUE	2913	985	4.778312	34.188281
82	MARANG	9	PUNRANGA	1223	745	4.103839	30.628843
82	MARANG	10	ALESIPITTO	1713	794	5.85177	36.02483
92	SEGERI	5	BARING	3300	869	35.642599	27.870701
92	SEGERI	6	PARENRENG	2781	1356	9.005646	35.876896
102	MINASA TENE	7	KABBA	3061	1250	9.689619	24.259563
102	MINASA TENE	8	PANAUKANG	2663	1157	9.689619	28.701737
112	MANDALLE	1	BENTENG	2969	1591	9.642121	34.671067
112	MANDALLE	2	MANGGALUNG	2261	702	7.286214	28.677525
112	MANDALLE	3	TAMARUPA	2593	1175	3.457864	24.7618
112	MANDALLE	4	MANDALLE	2936	392	4.958805	29.234203
112	MANDALLE	5	BODDIE	2061	882	7.656699	39.71005
112	MANDALLE	6	COPPO TOMPONG	1898	595	5.148798	39.865069
122	TONDONG TALLASA	1	BANTI MURUNG	1877	611	25.098013	39.670886
122	TONDONG TALLASA	2	TONDONG KURA	1841	645	18.049291	36.393055
122	TONDONG TALLASA	3	LANNE	1724	564	18.999253	37.120759
122	TONDONG TALLASA	4	BULUTELLUE	2072	959	15.427394	26.622949
122	TONDONG TALLASA	5	MALAKA	912	278	16.738342	30.890911
122	TONDONG TALLASA	6	BONTO BIRAO	1406	632	11.323555	36.501155

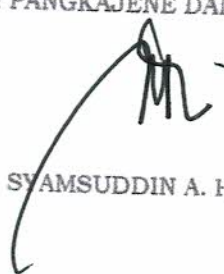
ARSIP BAGIAN HUKUM

132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	1	MATTIRO KANJA	2344	835	4.483824	50.698926
132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	2	MATTIRO BAJI	1393	595	20.899178	59.095204
132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	3	MATTIRO BULU	3013	1467	10.449589	47.484098
132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	4	MATTIRO BOMBANG	2687	1128	2.697894	46.991814
132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	5	MATTIRO LABANGENG	996	284	9.499627	65.388915
132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	6	MATTIRO ULENG	1914	1171	29.448842	55.535452
132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	7	MATTIRO WALIE	1651	807	3.799851	49.26086

TELAH DITELITI OLEH
 BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Pangkajene,
IRDAS, SH, M.SI
 NIP: 19660920 199303 1 011

PARAF
 SEKDA :
 ASISTEN :
 KABAN :
 KABID :
 KONSEPTOR :
 PENCIPTA :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


 SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2017

**DAFTAR BESARAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa
(1)	(2)	(3)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang
1	LIUKANG TANGAYA	SABARU	1,056,205,000	1,040,772,000	15,433,000
2	LIUKANG TANGAYA	BALO BALOANG	1,148,073,000	1,131,341,000	16,732,000
3	LIUKANG TANGAYA	SABALANA	1,192,108,000	1,174,753,000	17,355,000
4	LIUKANG TANGAYA	TAMPAANG	1,095,101,000	1,079,118,000	15,983,000
5	LIUKANG TANGAYA	SAILUS	1,130,134,000	1,113,655,000	16,479,000
6	LIUKANG TANGAYA	SATANGER	1,060,902,000	1,045,403,000	15,499,000
7	LIUKANG TANGAYA	KAPOPOSAN BALI	1,073,260,000	1,057,585,000	15,675,000
8	LIUKANG TANGAYA	POLEONRO	1,072,551,000	1,056,887,000	15,664,000
9	LIUKANG KALMAS	PAMMAS	1,131,027,000	1,114,536,000	16,491,000
10	LIUKANG KALMAS	SABARU	1,088,620,000	1,072,729,000	15,891,000
11	LIUKANG KALMAS	KANYURANG	1,102,140,000	1,086,058,000	16,082,000
12	LIUKANG KALMAS	DOANG DOANGAN LOMPO	1,029,950,000	1,014,889,000	15,061,000
13	LIUKANG KALMAS	MARA SENDE	1,034,650,000	1,019,522,000	15,128,000
14	LIUKANG KALMAS	DEWAKANG	1,077,534,000	1,061,799,000	15,735,000
15	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DECENG	1,251,440,000	1,233,245,000	18,195,000
16	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO LANGI	1,249,138,000	1,230,976,000	18,162,000
17	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO MATAE	1,190,279,000	1,172,950,000	17,329,000
18	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO UJUNG	1,137,784,000	1,121,196,000	16,588,000
19	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DOLANGENG	1,155,856,000	1,139,013,000	16,843,000
20	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO BONE	1,065,959,000	1,050,388,000	15,571,000
21	LIUKANG TUPABBIRING	MATTARO ADAE	1,086,381,000	1,070,522,000	15,859,000
22	BALOCCHI	TOMPOBULU	1,167,902,000	1,150,890,000	17,012,000
23	BUNGORO	BOWONG CINDEA	1,178,064,000	1,160,908,000	17,156,000
24	BUNGORO	TABO TABO	1,175,879,000	1,158,753,000	17,126,000
25	BUNGORO	MANGILU	1,196,383,000	1,178,967,000	17,416,000
26	BUNGORO	BULU CINDEA	1,201,369,000	1,183,883,000	17,486,000
27	BUNGORO	BIRING ERE	1,109,680,000	1,093,490,000	16,190,000
28	LABAKKANG	PATTALASSANG	1,110,198,000	1,094,001,000	16,197,000
29	LABAKKANG	MANAKKU	1,117,457,000	1,101,158,000	16,299,000
30	LABAKKANG	GENTUNG	1,101,542,000	1,085,468,000	16,074,000
31	LABAKKANG	BATARA	1,267,125,000	1,248,708,000	18,417,000
32	LABAKKANG	TARAWEANG	1,243,284,000	1,225,204,000	18,080,000
33	LABAKKANG	KANAUNGAN	1,181,617,000	1,164,410,000	17,207,000
34	LABAKKANG	BONTO MANAI	1,150,974,000	1,134,200,000	16,774,000
35	LABAKKANG	KASSI LOE	1,114,198,100	1,097,945,100	16,253,000
36	LABAKKANG	BARA BATU	1,254,337,000	1,236,102,000	18,235,000
37	MARANG	PADANG LAMPE	1,141,112,000	1,124,478,000	16,634,000
38	MARANG	TAMANGAPA	1,154,340,000	1,137,519,000	16,821,000
39	MARANG	PITUSUNGGU	1,070,649,000	1,055,011,000	15,638,000
40	MARANG	PITUE	1,125,541,000	1,109,127,000	16,414,000
41	MARANG	PUNRANGA	1,056,096,000	1,040,665,000	15,431,000
42	MARANG	ALESIPITTO	1,084,070,000	1,068,243,000	15,827,000
43	SEGERI	BARING	1,173,812,000	1,156,716,000	17,096,000
44	SEGERI	PARENRENG	1,167,122,000	1,150,121,000	17,001,000
45	MINASA TENE	KABBA	1,147,507,000	1,130,783,000	16,724,000
46	MINASA TENE	PANAİKANG	1,136,270,000	1,119,705,000	16,565,000

47	MANDALLE	BENTENG	1,192,553,000	1,175,191,000	17,362,000
48	MANDALLE	MANGGALUNG	1,080,223,000	1,064,450,000	15,773,000
49	MANDALLE	TAMARUPA	1,118,166,000	1,101,857,000	16,309,000
50	MANDALLE	MANDALLE	1,064,415,000	1,048,869,000	15,546,000
51	MANDALLE	BODDIE	1,109,672,000	1,093,483,000	16,189,000
52	MANDALLE	COPPO TOMPONG	1,074,852,000	1,059,155,000	15,697,000
53	TONDONG TALLASA	BANTI MURUNG	1,113,881,000	1,097,633,000	16,248,000
54	TONDONG TALLASA	TONDONG KURA	1,097,514,000	1,081,496,000	16,018,000
55	TONDONG TALLASA	LANNE	1,090,224,000	1,074,310,000	15,914,000
56	TONDONG TALLASA	BULUTELLUE	1,111,726,000	1,095,508,000	16,218,000
57	TONDONG TALLASA	MALAKA	1,030,500,000	1,015,431,000	15,069,000
58	TONDONG TALLASA	BONTO BIRAO	1,073,092,000	1,057,420,000	15,672,000
59	LK. TUPABBIRING UTARA	MATTIRO KANJA	1,123,040,000	1,106,662,000	16,378,000
60	LK. TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BAJI	1,122,704,000	1,106,330,000	16,374,000
61	LK. TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BULU	1,203,587,000	1,186,069,000	17,518,000
62	LK. TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BOMBANG	1,148,994,000	1,132,249,000	16,745,000
63	LK. TUPABBIRING UTARA	MATTIRO LABANGENG	1,072,438,000	1,056,775,000	15,663,000
64	LK. TUPABBIRING UTARA	MATTIRO ULENG	1,198,993,000	1,181,540,000	17,453,000
65	LK. TUPABBIRING UTARA	MATTIRO WALIE	1,100,270,000	1,084,214,000	16,056,000
Total			73,382,464,100	72,312,434,100	1,070,030,000

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID



PARAF
SEKDA :
AS-STEEN :
KABAN :
KABID :
KONSEPTOR :
PENGETIK :